

BAB II

FENOMENA PRT INTERNASIONAL DAN DOMESTIK

Bab ini berisi pemaparan tentang fenomena pekerja rumah tangga secara global dan pekerja rumah tangga secara domestik. Terdapat beberapa sub pembahasan dalam bab ini diantaranya mengenai pekerja rumah tangga, yang mana dalam sub bab ini membahas mengenai pekerja rumah tangga termasuk pekerjaan dalam sektor formal atau informal, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak-anak. Selanjutnya, mengenai fenomena global pekerja rumah tangga, fenomena pekerja rumah tangga di Indonesia, kemudian membahas mengenai masalah-masalah pekerja rumah tangga di Indonesia.

2.1 Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Menurut konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga pasal 1, Pekerja Rumah Tangga (PRT) didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan di dalam rumah tangga yang digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, baik untuk satu atau beberapa rumah tangga, serta terikat dalam suatu hubungan kerja, dan bukan melakukan pekerjaan rumah tangga secara kadang-kadang.⁴⁷ Akan tetapi konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi PRT ini belum diratifikasi oleh Indonesia tetapi Indonesia mempunyai

⁴⁷ Laporan International Labour Organization, *Buku Saku Kumpulan Peraturan-Peraturan Dan Referensi Tentang Pekerja Rumah Tangga*, hal. 207-208, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_539099.pdf (16/2/2017, 11:03 WIB)

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU tersebut disusun atas dasar komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada Hak Asasi Manusia di tempat kerja antara lain dengan diwujudkan melalui ratifikasi kedelapan konvensi dasar ILO diantaranya

1. Kebebasan berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98)
2. Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111)
3. Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105)
4. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182)

Sejalan dengan ratifikasi kedelapan konvensi ILO tersebut, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan disusun dan harus mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada kedelapan konvensi dasar tersebut. Definisi tenaga kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 pasal 1 *“tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”*.⁴⁸ Akan tetapi PRT seringkali terkecualikan dari UU No. 13 tahun 2003 padahal sebenarnya apabila melihat definisi tenaga kerja tersebut harusnya PRT juga tercakup dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya sampai saat ini masih belum ada rumusan khusus yang bersifat formal mengenai pengertian Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mendefinisikan *“PRT adalah orang yang bekerja pada orang*

⁴⁸ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (30/08/2017, 10:10 WIB)

*perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”.*⁴⁹

Sebenarnya penggunaan istilah pekerja bagi PRT ini masih menjadi perdebatan tidak hanya di Indonesia akan tetapi di negara-negara lain, lebih khususnya di negara-negara berkembang. Akan tetapi menurut aktivis LSM di Indonesia seperti Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND), Organisasi pekerja rumah tangga (OPERATA), dan lain sebagainya, pekerjaan rumah tangga sama halnya dengan pekerjaan lainnya.⁵⁰ Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk membedakan pekerjaan PRT ini dengan pekerjaan lainnya.⁵¹ Penggunaan istilah pekerja pada PRT ini merupakan sebuah wacana yang dikembangkan oleh para aktivis LSM seperti rumpun tjoet Nyak Dien, organisasi pekerja rumah tangga, dan LSM lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap PRT serta organisasi perburuhan internasional (ILO), dengan tujuan untuk mengganti istilah pembantu. Dengan adanya perubahan istilah dari pembantu ke pekerja ini diharapkan pekerja domestik dapat dilindungi oleh hukum-hukum ketenagakerjaan.

Penyebutan pembantu pada PRT inilah yang bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakteraturan kerja PRT, PRT seringkali ditimpa persoalan-persoalan seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, serta menjadi

⁴⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, diakses dalam https://jdih.bnp2tki.go.id/images/permen/PERMEN_No_2_Tahun_2015_Tentang_Perlindungan_Pekerja_Rumah_Tangga.pdf (27/10/2017, 10:17 WIB)

⁵⁰ Yuli Maiheni: Matahari Pekerja Rumah Tangga, diakses dalam <http://www.jurnalperempuan.org/tokoh/yuli-maiheni-matahari-pekerja-rumah-tangga> (20/07/2017, 07:53 WIB)

⁵¹ Laporan International Labour Organization, *Bunga-Bunga di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*, hal. 7-8, diakses melalui <http://globalmarch.org/Child-Labour-Domestic/resources/indonesia/Flowers%20on%20the%20rock%20the%20phenomenon%20of%20child%20domestic%20workers%20in%20Indonesia.pdf> (16/2/2017, 10:24 WIB)

penyebab Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tidak juga selesai dibahas.⁵² Ketidakteraturan kerja PRT bisa terlihat bahwa PRT biasanya mengerjakan semua jenis pekerjaan yang ada di rumah tangga.

Apabila melihat dari posisi dan fungsi PRT itu sendiri, PRT merupakan posisi yang sangat vital bagi keluarga-keluarga tertentu, yang mana suami dan istri bekerja sehingga mereka berfungsi sebagai manajer pengelola rumah tangga, sementara majikannya berada di luar rumah. Artinya, PRT berperan sebagai kunci atas kelangsungan dan kehidupan sebuah rumah tangga. Secara tidak langsung dalam kondisi ini PRT memberikan kontribusi dalam kelangsungan karir serta pekerjaan majikannya.

Berdasarkan waktu kerjanya, PRT bisa digolongkan ke dalam dua kelompok yakni⁵³

1. PRT yang *live-in*, artinya PRT tersebut bekerja di rumah majikan sekaligus tinggal di rumah majikan serta menjadi bagian dari keluarga majikan.
2. PRT yang *live-out*, artinya PRT yang bekerja di rumah majikan, akan tetapi tidak tinggal di rumah majikannya, PRT tersebut hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama waktu tertentu (pagi-pagi, siang-sore, atau pagi-sore), serta ada pekerjaan khusus yang dikerjakan dan tidak menjadi bagian keluarga majikan.

⁵²PRT Adalah Pekerja, Bukan Pembantu, diakses dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bea80c54626/prt-adalah-pekerja-bukan-pembantu> (16/2/2017, 10:48 WIB)

⁵³Wawancara penulis dengan Direktur LPKP Jawa Timur, Suti'ah, Malang, 3 Februari 2017

2.2 Fenomena Global Pekerja Rumah Tangga

PRT merupakan fenomena yang telah tersebar luas dan berkembang di seluruh dunia serta menjadi fenomena internasional.⁵⁴ Fenomena PRT tersebut merupakan permasalahan serius yang mendesak untuk dicari jalan pemecahannya. Permasalahan mengenai PRT senantiasa menjadi pembicaraan hangat yang tidak kunjung selesai. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan diberbagai media massa yang memberitakan mengenai masalah yang dihadapi oleh para PRT di dunia. Tiga dari sepuluh PRT di dunia tidak memiliki perlindungan hukum nasional mengenai tenaga kerja.⁵⁵

Sebagian besar jumlah PRT yang paling tinggi berada pada negara-negara miskin atau berkembang. Ada sekitar 52.600.000 laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai PRT di dunia. Jumlah paling banyak terdapat pada PRT perempuan. Data tersebut menunjukkan di negara maju jumlah perempuan yang bekerja sebagai PRT sebanyak 2.597.000 orang, kemudian di Eropa Timur dan CIS jumlahnya 396.000 orang, Asia dan Pasifik jumlahnya mencapai 17.464.000 orang, Amerika Latin dan Karibia mencapai jumlah yang paling tinggi yakni sebesar 18.005.000 orang, Afrika sebanyak 3.835.000 orang, yang terakhir di Timur Tengah mencapai 1.329.000 orang.⁵⁶

⁵⁴Kola O. Odeku, *An Overview of Domestic Work Phenomenon*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol, 5, No, 9, Italy: MCSER Publishing, hal. 697-698, diakses melalui <http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/2861/2823> (22/03/2017, 17:38 WIB)

⁵⁵*Protect The Global Domestic Worker: Report*, The Tyee, diakses melalui <https://thetyee.ca/News/2013/01/16/Domestic-Worker/> (22/03/2017, 18:05 WIB)

⁵⁶ Laporan International Labour Organization, *Domestic Workers Across The World: Global and Regional Statistics and The Extent of Legal Protection*, hal. 20, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf (22/03/2017, 19:09 WIB)

Jumlah PRT di Amerika Latin dan Karibia jumlahnya berada pada posisi yang paling tinggi yakni mencapai 19.593.000 orang.⁵⁷ Hal ini diakibatkan karena wilayah Amerika Latin dan Karibia merupakan wilayah dengan tingkat ketidakadilan pendapatan yang tinggi menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) tahun 2010, sehingga rumah tangga di bagian atas mempunyai sumber daya untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga sementara itu pekerja yang berada di bagian bawah harus bersedia menerima pekerjaan di layanan rumah tangga meskipun tingkat upah serta perlindungan sosial rendah.⁵⁸

Jumlah PRT perempuan di Amerika Latin dan Karibia sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena memang mayoritas pekerja rumah tangga diminati oleh kaum perempuan, akan tetapi selain dimensi *gender* tersebut ada alasan lain. Kemungkinan perempuan tersebut menjadi PRT disebabkan karena perbedaan warna kulit hitam dan tidak hitam. Menurut Survei Rumah Tangga Nasional (*Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilios* Atau PNAD) ada sekitar 21,7 persen semua perempuan kulit hitam yang dipekerjakan adalah sebagai PRT.⁵⁹ Sedangkan untuk jumlah PRT secara global pada tahun 2016 ILO memperkirakan lebih dari 67 juta PRT yang mengisi angkatan kerja, khususnya di negara-negara berkembang.⁶⁰

⁵⁷*Domestic Workers*, diakses melalui <http://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups/domestic-workers> (22/07/2017, 10:05 WIB)

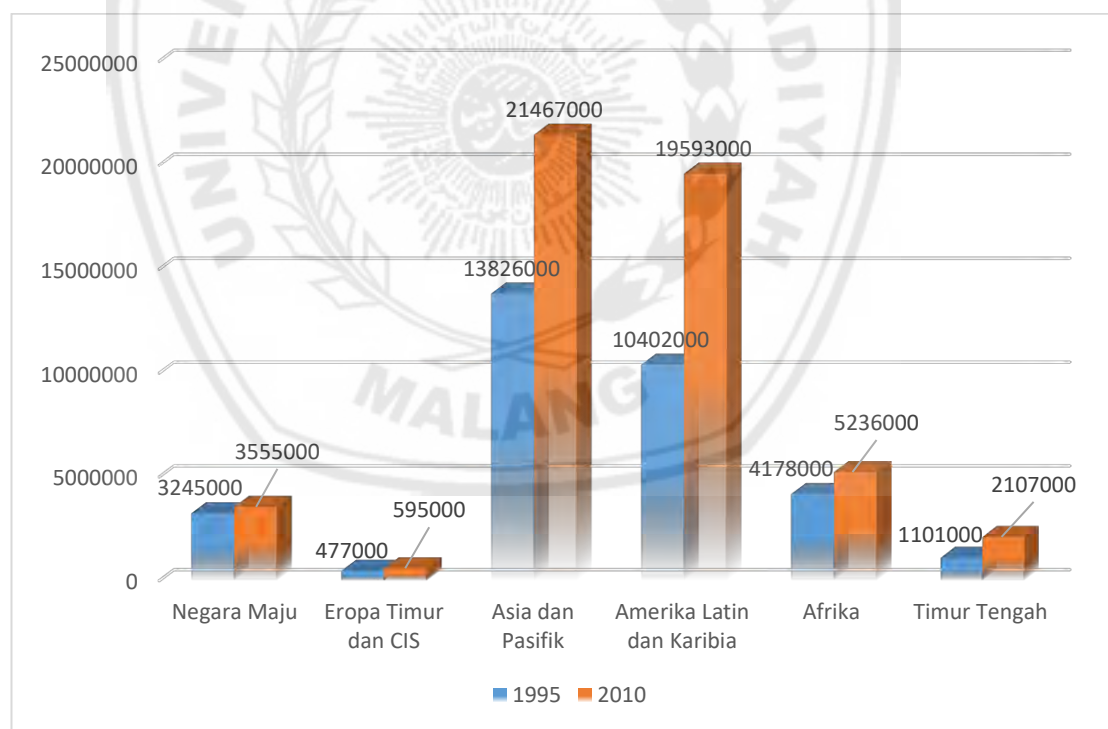
⁵⁸*Ibid.*, hal. 25-26

⁵⁹*Ibid.*, hal. 26-27

⁶⁰ *Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik Tembok Ruang Domestik*, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_569568.pdf (25/08/2017, 13:15 WIB)

Sektor PRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data ILO dari tahun 1995 hingga tahun 2010, jumlah PRT naik sekitar 19 juta dari jumlah 33.200.000 menjadi 52.600.000. Dapat dilihat pada diagram batang 2.1, rincian dari data tersebut mencatat bahwa Asia dan Pasifik mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni dari jumlah 13.826.000 di tahun 1995, kemudian pada tahun 2010 jumlah tersebut semakin meningkat sebanyak 21.467.000, yang mana jumlah tersebut terdiri dari PRT laki-laki dan perempuan. PRT perempuan tetap yang memegang jumlah tertinggi yakni pada tahun 1995 sebanyak 12.194.000 sedangkan pada tahun 2010 mencapai 17.464.000.⁶¹

Diagram 2.1 Kenaikan Jumlah PRT Global Tahun 1995 ke 2010



Sumber : ILO.org

⁶¹ *Child Labour and Domestic Work*, diakses dalam <http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm> (22/07/2017, 07:08 WIB)

Dikawasan Asia, Filipina dan Indonesia memiliki jumlah PRT yang cukup tinggi. Survei angkatan kerja di Filipina menunjukkan pada tahun 2010 jumlah orang yang bekerja sebagai PRT mencapai 1,9 juta, jumlah tersebut naik sekitar 1,2 juta dari tahun 2001.⁶² PRT Filipina yang bekerja di dalam negeri, sebagian besar berasal dari daerah-daerah miskin, kemudian mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, serta kurang memiliki pengalaman kerja dari PRT yang mengambil penempatan di luar negeri.⁶³

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh PRT global diantaranya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah atau upah rendah, perlakuan yang tidak manusiawi, jam kerja yang panjang, dan lain sebagainya. PRT merupakan pekerjaan yang berada di wilayah privat atau tersembunyi, yang mana pada rumah tangga lebih memusat pada wilayah internal bukan di wilayah publik sehingga hal inilah yang menempatkan PRT pada resiko pelecehan seksual dan penyerangan. Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Kuwait, para PRT sangat takut untuk melaporkan kekerasan seksual tersebut karena beresiko, para PRT dapat diadili dan dihukum akibat perzinahan serta pencabulan.⁶⁴

Upah PRT bisa dibilang rendah, para PRT biasanya hanya mendapatkan kurang dari setengah upah rata-rata bahkan terkadang tidak lebih dari 20 persen

⁶²*Ibid.*, hal. 29

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Laporan Human Rights Watch, *Decent Work For Domestic Workers: The Case For Global Labor Standards*, hal. 9, diakses dalam https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/HRW_ILO_brochure_lores.pdf (30/05/2017, 10:06 WIB)

upah rata-rata.⁶⁵ Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang cenderung saling berkaitan, salah satu faktor utamanya yakni tingkat pendidikan pekerja rumah tangga pada umumnya rendah, kemudian fenomena kurang dihargainya PRT, dan lain sebagainya. Ada sekitar 27,2 juta PRT berhak atas upah minimum yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lain, 22,3 juta PRT tidak mempunyai perlindungan terhadap upah yang terlalu rendah serta tidak memiliki standar upah minimum yang berlaku bagi para PRT.⁶⁶ Hal ini diakibatkan oleh fakta bahwa para PRT tersebut hidup di negara yang tidak memiliki undang-undang upah minimum. Kemudian sekitar 21,5 juta PRT tidak dicakup oleh peraturan upah minimum akan tetapi peraturan tersebut ada hanya untuk pekerja lain. Pekerja rumah tangga di Amerika Serikat dibayar kurang dari 25 persen upah minimum.⁶⁷ Di beberapa negara, seringkali para majikan juga menahan upah dari PRT sampai cuti tahunan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para PRT tersebut akan kembali bekerja.⁶⁸ Salah satu alasan rendahnya upah pekerja rumah tangga adalah posisi tawar mereka yang lemah.

Masalah mengenai jam kerja yang panjang bagi PRT merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh sebagian besar PRT di seluruh dunia. Di Asia dan Timur Tengah, ada sekitar 95 persen PRT tidak mempunyai batasan jam kerja

⁶⁵ Laporan International Labor Organization, *Pengupahan Pekerja Rumah Tangga*, hal. 1, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166260.pdf (30/05/2017, 11:02 WIB)

⁶⁶ Laporan International Labour Organization, *Cakupan Pekerja Rumah Tangga di Dalam Undang-Undang Kondisi Kerja Utama*, Op. Cit, hal 4

⁶⁷ *The Global Plight of Domestic Workers: Few Rights, Little Freedom, Frequent Abuse*, diakses dalam <https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/17/global-plight-domestic-workers-labour-rights-little-freedom-abuse> (30/05/2017, 16:59 WIB)

⁶⁸ *Ibid.*

normal mingguan yang berlaku.⁶⁹ Hal ini mengakibatkan timbulnya jam kerja yang sangat panjang, khususnya banyak terjadi pada PRT yang *live-in*. Selain masalah mengenai jam kerja yang terlalu panjang, adapun masalah lain yang masih terkait yakni mengenai penentuan jangka waktu istirahat mingguan.

Lazimnya istirahat mingguan diberikan pada PRT setidaknya satu hari libur disetiap minggunya. Akan tetapi masih ada sekitar 23,6 juta PRT di seluruh dunia, tidak mendapatkan hak atas istirahat mingguan di bawah hukum nasional.⁷⁰ Di kawasan Asia dan Timur Tengah, hanya 5 persen dari semua PRT yang mempunyai hak atas satu hari istirahat mingguan di bawah hukum nasional.⁷¹ Istirahat mingguan merupakan satu elemen terpenting, karena selain untuk menjaga kesehatan, para PRT juga bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan memperluas hak atas istirahat mingguan para PRT juga akan lebih *fresh* sehingga dapat memberikan layanan yang baik dan berkualitas untuk majikan.

2.3 Fenomena Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Fenomena PRT di Indonesia bukanlah fenomena baru. Munculnya PRT di Indonesia merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan karena jumlah PRT di Indonesia meningkat seiring dengan semakin terbukanya lapangan kerja. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional (Sakernas) dalam laporan ILO, pada tahun 2012 ada sekitar 2.555.000 PRT yang bekerja di dalam negeri.⁷²

⁶⁹ Laporan International Labour Organization, *Cakupan Pekerja Rumah Tangga di Dalam Undang-Undang Kondisi Kerja Utama*, Op. Cit, hal 5

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Laporan International Labour Organization, *Technical Report: The Estimation Of Total Domestic Workers In Indonesia*, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf (03/05/2017, 07:43 WIB)

63 persen dari jumlah tersebut atau 1.609.650 adalah PRT yang bekerja selama tujuh hari dalam satu minggu, hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam kondisi kerja PRT di Indonesia.⁷³ Hal inilah yang kemudian menyebabkan pekerjaan sebagai PRT semakin lama semakin menunjukkan permasalahan tersendiri terutama pada masalah pengabaian akan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh PRT. Pengabaian hak ini cenderung mengarah pada arti eksploitasi serta kemungkinan besar terjadinya tindakan kekerasan pada PRT di Indonesia.

PRT di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja melainkan sebagian besar masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai pembantu. Hal ini dikarenakan bersifat membantu. PRT merupakan posisi yang sangat vital bagi keluarga-keluarga tertentu, yang mana suami dan istri bekerja sehingga mereka berfungsi sebagai manager pengelola rumah tangga, sementara majikannya berada di luar rumah. Artinya, PRT berperan sebagai kunci atas kelangsungan dan kehidupan sebuah rumah tangga. Secara tidak langsung dalam kondisi ini PRT memberikan kontribusi dalam kelangsungan karier serta pekerjaan majikannya.

Penyebutan PRT sebagai pembantu tersebut yang membuat PRT di Indonesia seringkali tidak terlindungi dari UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, padahal menurut UU No. 13 tahun 2003 PRT termasuk ke dalam definisi pekerja, hal ini yang kemudian menyebabkan pengabaian atas hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh PRT seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 13 tahun 2003 mencakup aturan jam kerja, berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang

⁷³ Laporan International Labour Organization, *Promosi Kerja Layak Untuk Pekerja Rumah Tangga*, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf (31/10/2017, 20:34 WIB)

Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2 dijelaskan bahwa waktu kerja normal adalah 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu serta 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.⁷⁴ Kemudian menyediakan keamanan di tempat kerja, berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 pasal 86 telah dijelaskan juga bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁷⁵

Berbicara mengenai PRT memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Kondisi ini terjadi ketika orang merasa membutuhkan pendapatan setiap bulan. Hal ini seringkali terjadi pada perempuan-perempuan golongan menengah ke bawah yang ekonomi keluarganya membutuhkan partisipasi kaum perempuan. Fenomena perempuan yang bekerja sebagai PRT di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Kondisi ini pada satu sisi memberikan satu hal yang positif karena sejatinya perempuan juga berhak memperoleh kesetaraan dalam hal pekerjaan, akan tetapi disisi lain hal ini membuka celah masalah baru apabila dalam melakukan pekerjaannya tidak diperlakukan sesuai aturan pekerja pada umumnya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan bahwa di setiap tahunnya jumlah perempuan yang memasuki pasar kerja semakin meningkat. Data dari BPS tahun 2010 menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi atau penduduk yang

⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (12/06/2017, 11:11 WIB)

⁷⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit

bekerja, mempersiapkan usaha mencapai 107,7 juta jiwa, yang mana jumlah tersebut terdiri dari 39,5 juta orang perempuan dan 68,2 juta orang laki-laki.⁷⁶ Hal ini merupakan kenyataan bahwa perempuan juga menyumbang dalam pembangunan suatu negara terbukti dengan adanya partisipasi perempuan sebagai pekerja. Sehingga perempuan khususnya yang berada pada lapisan bawah di Indonesia mempunyai peran ganda yakni selain sebagai ibu yang melahirkan anak, perempuan tersebut juga berperan sebagai pencari kerja dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.

2.4 Masalah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Melihat berbagai permasalahan yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh para PRT di Indonesia. Masalah yang seringkali dihadapi oleh para PRT ialah pelanggaran yang menyangkut baik itu haknya sebagai pekerja maupun haknya sebagai perempuan karena sebagian besar yang bekerja sebagai PRT di Indonesia adalah perempuan. Jutaan perempuan di Indonesia yang bekerja sebagai PRT sering mendapat perlakuan semena-mena dari majikan. Perlakuan tersebut terjadi khususnya di rumah-rumah yang merupakan wilayah *privat*, yang mana lebih memusat pada wilayah internal bukan di wilayah publik sehingga apabila timbul permasalahan tidak diketahui oleh publik serta penyelesain masalahnya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik.⁷⁷

⁷⁶Jumlah Angkatan Kerja Mencapai 107,7 Juta Jiwa, Badan Pusat Statistik, diakses melalui <http://sp2010.bps.go.id/> (22/03/2017, 21:12 WIB)

⁷⁷Pekerja di Dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Human Right Watch, hal. 1, diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0209in_web.pdf (23/03/2017, 20:29 WIB)

Kekerasan yang dialami oleh PRT di Indonesia masih seringkali terjadi. Tahun 2015 ada sekitar 376 kasus, yang mana 65 persen dari kasus kekerasan yang dialami oleh PRT adalah multi kekerasan yakni upah yang tidak dibayar, pelecehan, dan penganiayaan.⁷⁸ Menurut data dari JALA PRT hingga bulan September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Kekerasan yang terjadi pada PRT terdiri dari kekerasan multi jenis mencapai 41 kasus yang mana kekerasan ini mencakup kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual, kemudian yang kedua yakni kekerasan fisik sebanyak 102 kasus terdiri dari pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia, dan ketiga yakni kekerasan ekonomi mencapai 74 kasus.⁷⁹

Adapun beberapa contoh kasus kekerasan pada PRT yang terjadi di Indonesia. Pertama, Mufiatun yang bekerja sebagai PRT di rumah Agus Susanto yang beralamat di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus. Mufiatun mendapat perlakuan kasar dari majikan seperti penganiayaan dengan cara menyetraka perutnya karena melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai majikannya.⁸⁰ Kedua, kasus kekerasan yang dialami Sartini yang bekerja sebagai PRT. Sartini beserta anaknya selama rentang waktu 9 bulan dianiaya di dua lokasi yang berbeda, yang mana kedua lokasi tersebut diketahui Sartini sebagai rumah majikannya

⁷⁸376 Kasus Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Mencuat Sepanjang 2015, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/04/376-kasus-kekerasan-pembantu-rumah-tangga-mencuat-sepanjang-2015> (05/06/2017, 09:27 WIB)

⁷⁹Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus, Kompas, 15 September 2016, diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.p.prt.capai.217.kasus> (23/03/2017, 20:44 WIB)

⁸⁰Polisi Tangkap Majikan Penyetrika Pembantu Rumah Tangga, Antara News, 10 Oktober 2016, diakses melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/589400/polisi-tangkap-majikan-penyetraka-pembantu-rumah-tangga> (23/03/2017, 20:58 WIB)

berada di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, Yogyakarta. Tidak hanya berhenti pada penganiayaan akan tetapi Sartini dan anaknya pernah juga disekap.⁸¹ Ketiga, Toipah yang bekerja sebagai PRT khususnya pengasuh anak yang bekerja di rumah majikannya yang bernama Fanny Safriansyah dan Anna Susilowati. Selama bekerja menjadi pengasuh anak Toipah sering mengalami kekerasan serta penyiksaan yang terjadi di rumah majikannya tersebut yang beralamat di Apartemen Ascott, Kebon Kacang, DKI Jakarta. Kasus ini berlangsung sejak Juli hingga akhir September 2015. Toipah sering mendapat pukulan dengan tangan atau pun benda keras, tendangan, serta tamparan dari majikan.⁸²

Daftar panjang perlakuan kasar dan tidak manusiawi baik secara fisik, psikologis, seksual, dan lain sebagainya yang dilontarkan oleh majikan terkadang pemicu kekerasannya hanya bersumber dari kesalahan kecil atau ketidak sengajaan yang diperbuat oleh para PRT. Masih banyak lagi contoh kasus yang belum diketahui oleh publik, yang telah disebutkan di atas hanya sebagian kasus saja.

Merujuk pada definisi kerja layak menurut ILO yakni sarana untuk mencapai keadilan baik itu keadilan dalam memberikan penghasilan yang adil, menyediakan keamanan di tempat kerja dan menjamin perlakuan (bermartabat), kesempatan yang sama bagi semua.⁸³ Pertama, penghasilan yang adil. Hal ini juga merupakan instrumen yang penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja

⁸¹*Majikan Aniaya PRT Beserta Anaknya Yang Berusia 1,5 Tahun*, Tribun News, 18 November 2016, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/18/majikan-aniaya-prt-beserta-anaknya-yang-berusia-15-tahun> (23/03/2017, 21:18 WIB)

⁸²*Kasus Kekerasan Terhadap PRT Dampak Absennya Perlindungan Negara*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, diakses melalui <http://www.bantuanhukum.or.id/web/kasus-kekerasan-terhadap-prt-dampak-absennya-perlindungan-negara/> (23/03/2017, 21:28 WIB)

⁸³ *Decent Work*, diakses dalam <http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm> (28/10/2017, 09:07 WIB)

rentan dan dibayar paling rendah dari cakupan upah yang terlalu rendah.⁸⁴ PRT seringkali termasuk dalam kelompok ini.

Kedua, kondisi kerja yang aman dan bermartabat. Pelecehan seringkali dialami oleh sebagian besar PRT, mengingat pekerjaan sebagai PRT sebagian besar diminati oleh perempuan. Pelecehan seringkali dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan sehingga korban akan mengalami kesulitan dalam membela diri. Pelecehan yang kerap kali terjadi pada PRT ini adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik maupun isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat seksual.⁸⁵

Semua perlindungan yang menyangkut tiga komponen dalam definisi kerja layak menurut ILO ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi diperinci hanya berlaku bagi para pekerja dan pengusaha. Inilah yang kemudian menyebabkan PRT yang cara kerjanya tidak masuk ke dalam definisi dipekerjakan oleh seorang pengusaha sehingga PRT tidak dimasukkan dalam perlindungan UU No.13 tahun 2003. Mengakibatkan PRT di Indonesia tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-hak kerja mereka.

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang pekerjaan yang layak bagi PRT akan tetapi Indonesia telah mengakui

⁸⁴*K131 Konvensi Penetapan Upah Minimum 1970*, International Labour Organization, hal. 3, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_181928.pdf (12/06/2017, 08:54 WIB)

⁸⁵*Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*, hal. 6, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171328.pdf (12/06/2017, 10:27 WIB)

beberapa norma hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan PRT diantaranya Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁸⁶ Dalam pengertian tenaga kerja menurut UU tersebut tidak terdapat pembeda antara pekerjaan di sektor formal dan informal. Lantas, ada pengecualian atas pemberlakuan UU No.13 tahun 2003 karena undang-undang tersebut tidak berlaku luas bagi semua pekerja di Indonesia, dan PRT termasuk mereka yang tidak dilindungi dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut.

Dalam publikasi ILO yang berjudul “*Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*” menyebutkan pemerintah selama ini mempermasalahkan PRT tidak dimasukkan sebagai pekerja sebagaimana UU No.13 tahun 2003 karena masalah pemberi kerja, dalam hubungan antara PRT dengan majikan bukan merupakan badan usaha sementara pemerintah memuat bahwa pemberi kerja haruslah pengusaha.⁸⁷ Padahal PRT merupakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yang mana termuat dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan “pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemnaker.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (12/06/2017, 11:11 WIB)

⁸⁷ Laporan ILO, *Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik*, hal. 10, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf (28/10/2017, 16:06 WIB)

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya”.⁸⁸ Berdasarkan definisi tersebut PRT merupakan pekerja, serta hubungan yang terjadi antara PRT dengan majikan adalah hubungan kerja. Maka sudah sepantasnya PRT tidak di kecualikan dalam UU No.13 tahun 2003.

Pengecualian inilah yang kemudian menyebabkan PRT kesulitan apabila terjadi kasus pada PRT karena tidak adanya acuan dalam memutuskan perkara sehingga dari waktu ke waktu apabila terjadi permasalahan pada PRT, kasus PRT hanya berhenti di tengah jalan, tanpa ada penyelesaian hukum secara adil. Berbicara mengenai kondisi kerja yang aman dan bermartabat berdasarkan definisi kerja layak menurut ILO. Dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 86 telah dijelaskan juga bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.⁸⁹ Akan tetapi Melihat contoh kasus pelecehan seksual atau kekerasan yang telah disebutkan di atas, sangat tergambar jelas bahwa PRT di Indonesia memang tidak mempunyai hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini menegaskan bahwa implementasi UU dalam negara Indonesia sangat kurang. Inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa PRT di Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih, karena hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh PRT lebih banyak diabaikan.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit*